

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran strategis Pemerintah Kota Medan dalam upaya penanggulangan dan pengendalian dampak banjir yang menjadi permasalahan kronis di wilayah perkotaan. Banjir di Kota Medan telah mengakibatkan dampak multidimensi yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik, dengan manifestasi berupa terganggunya akses pendidikan, meningkatnya risiko penyakit, kerugian ekonomi pada pelaku usaha kecil menengah, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap kapasitas pemerintah. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggali data melalui wawancara mendalam dengan pejabat BPBD Kota Medan dan masyarakat terdampak, observasi langsung di kawasan rawan banjir, serta analisis dokumentasi kebijakan yang relevan. Kerangka teoretis penelitian mengintegrasikan teori kebijakan publik dari Riant Nugroho yang berfokus pada identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi, serta teori peran dari Miftah Thoha yang menguraikan lima dimensi peran pemerintah strategis, koordinatif, dan fasilitatif. Penelitian ini secara sistematis menganalisis efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya, termasuk keterbatasan anggaran, rendahnya koordinasi lintas ivublic, dan minimnya partisipasi masyarakat. Dengan memahami kompleksitas permasalahan banjir dari perspektif kebijakan ivublic dan administrasi, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam menangani dampak banjir, mengoptimalkan sinergi antara BPBD dengan instansi terkait, serta meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program mitigasi bencana. Kontribusi penelitian meliputi pengembangan model kebijakan penanggulangan banjir yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat serta penguatan kelembagaan dalam menghadapi tantangan pengelolaan bencana di wilayah perkotaan.

**Kata Kunci:** Banjir, Peran Pemerintah, Dampak Sosial-Ekonomi, Kebijakan Publik, Koordinasi Lintas Sektor, Partisipasi Masyarakat

## ABSTRACT

This study examines the strategic role of the Medan City Government in efforts to overcome and control the impact of flooding which is a chronic problem in urban areas. Flooding in Medan City has resulted in multidimensional impacts covering social, economic, and political aspects, manifested in the form of disrupted access to education, increased risk of disease, economic losses for small and medium business actors, and decreased public trust in government capacity. Using a qualitative descriptive approach, this study explores data through in-depth interviews with Medan City BPBD officials and affected communities, direct observation in flood-prone areas, and analysis of relevant policy documentation. The theoretical framework of the study integrates Riant Nugroho's public policy theory which focuses on problem identification, policy formulation, implementation, and evaluation, and Miftah Thoha's role theory which outlines five dimensions of strategic, administrative, coordinative, facilitative, and evaluative government roles. This study systematically analyzes the effectiveness of policies that have been implemented and identifies obstacles in their implementation, including budget constraints, low cross-sector coordination, and minimal community participation. By understanding the complexity of flood problems from the perspective of public policy and administration, this study is expected to produce strategic recommendations to strengthen government capacity in handling flood impacts, optimize synergy between BPBD and related agencies, and increase community awareness and involvement in disaster mitigation programs. Research contributions include the development of an integrated and sustainable flood management policy model, taking into account the socio-economic aspects of the community and strengthening institutions in facing the challenges of disaster management in urban areas.

**Keywords:** *Flood, Government Role, Socio-Economic Impact, Public Policy, Cross-Sector Coordination, Community Participation*